

Konstruksi Ancaman Keamanan ALKI II terhadap Stabilitas Ibu Kota Nusantara: Analisis Kebijakan Strategis Indonesia dalam Merespons Ancaman Aktor Negara dan Non-Negara dalam Perspektif *Securitization Theory*

Kamilah

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
Makassar

Email: kamilahtj24@gmail.com

Diterima: 0-06-2026 | Disetujui: 10-06-2026 | Diterbitkan: 12-06-2026

ABSTRACT

The relocation of the National Capital (IKN) to Nusantara, East Kalimantan, has significantly shifted the national center of gravity to a region that directly borders the Indonesian Archipelagic Sea Lane (ALKI II) a strategic shipping route stretching from the Lombok Strait, through the Makassar Strait, to the Sulawesi Sea. This study analyzes how multidimensional threats in ALKI II including the projection of military power by state actors and transnational criminal activities by non-state actors are addressed within the framework of Indonesia's defense policy. Geopolitically, ALKI II possesses strategic vulnerabilities; under UNCLOS 1982, this route which handles 20–30% of global maritime trade grants transit rights to foreign submarines in submerged positions, thereby creating a serious espionage risk to the security of the new capital. Using a descriptive-analytical qualitative method, this study examines this phenomenon through the lens of the Copenhagen School's Securitization Theory and Mahan's concept of Sea Power. The research findings reveal a substantial gap between threat projections in policy documents and operational capabilities on the ground, marked by radar coverage that has only reached 40% and the fact that the majority of defense equipment is aging. As a strategic solution, this study recommends accelerating the development of an AI-based Virtual Maritime Gate and upgrading the status of the Balikpapan Naval Base (Lanal Balikpapan) to a Naval Command (Lantamal) with 5R base functions, as well as strengthening the synergy between the Indonesian Navy, Bakamla, and local fishing communities as a resilient maritime defense force.

Keywords: *Securitization; ALKI II; Capital City Nusantara; State Actors; Transnational Crime.*

ABSTRAK

Relokasi Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur, secara signifikan telah menggeser pusat gravitasi nasional (Center of Gravity) ke wilayah yang berbatasan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yaitu jalur pelayaran strategis yang membentang dari Selat Lombok, melintasi Selat Makassar, hingga ke Laut Sulawesi. Kajian ini menganalisis bagaimana ancaman multidimensi di ALKI II yang mencakup proyeksi kekuatan militer aktor negara maupun aktivitas kriminal transnasional non-negara dikonstruksi dalam kerangka kebijakan pertahanan Indonesia. Secara geopolitik, ALKI II memiliki kerentanan strategis; berdasarkan UNCLOS 1982, jalur yang melayani 20–30% perdagangan maritim global ini memberikan hak lintas bagi kapal selam asing dalam posisi menyelam, sehingga menciptakan risiko spionase yang serius bagi keamanan ibu kota baru. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini membedah fenomena tersebut melalui lensa

Securitization Theory dari *Copenhagen School* serta konsep *Sea Power* Mahan. Temuan penelitian menunjukkan adanya gap substansial antara proyeksi ancaman dalam dokumen kebijakan dengan kapasitas operasional di lapangan, ditandai dengan cakupan radar yang baru mencapai 40% dan kondisi mayoritas alutsista yang telah berusia lanjut. Sebagai solusi strategis, penelitian ini merekomendasikan akselerasi pembangunan Virtual Maritime Gate berbasis AI, peningkatan status Lanal Balikpapan menjadi Lantamal dengan fungsi pangkalan 5R, serta penguatan sinergi antara TNI AL, Bakamla, dan komunitas nelayan lokal sebagai garda pertahanan maritim yang resilien

Katakunci: Sekuritisasi; ALKI II; Ibu Kota Nusantara; Aktor Negara; Kejahatan Transnasional.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Tjandung, K. (2026). Konstruksi Ancaman Keamanan ALKI II terhadap Stabilitas Ibu Kota Nusantara: Analisis Kebijakan Strategis Indonesia dalam Merespons Ancaman Aktor Negara dan Non-Negara dalam Perspektif *Securitization Theory*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1848-1864. <https://doi.org/10.63822/z38r1b40>

PENDAHULUAN

Keputusan strategis pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur merepresentasikan salah satu transformasi geopolitik paling signifikan dalam sejarah kontemporer Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan relokasi pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga merupakan langkah strategis yang berimplikasi pada perubahan mendasar dalam konfigurasi pertahanan, keamanan, dan tata kelola ruang nasional. Dari perspektif normatif, pemindahan tersebut memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menetapkan Nusantara sebagai simbol identitas nasional sekaligus pusat pemerintahan masa depan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan modernisasi kelembagaan negara. Meskipun demikian, di balik narasi transformasi tersebut terdapat dimensi geostrategis yang memerlukan perhatian serius. Letak Ibu Kota Nusantara (IKN) di kawasan pesisir timur Kalimantan menempatkannya pada kedekatan geografis dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yaitu salah satu jalur pelayaran internasional yang memiliki nilai strategis tinggi. Kondisi ini menghadirkan peluang bagi peningkatan konektivitas dan aktivitas ekonomi nasional, namun secara simultan juga menimbulkan berbagai tantangan keamanan yang berpotensi memengaruhi stabilitas serta kedaulatan negara.

ALKI II yang mencakup Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi merupakan salah satu jalur maritim strategis yang memiliki peran penting dalam sistem pelayaran internasional. Berdasarkan ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kewajiban untuk menjamin hak lintas alur laut kepulauan (*archipelagic sea lanes passage*) bagi kapal dan pesawat asing melalui jalur yang telah ditetapkan. Secara empiris, ALKI II melayani sekitar 20–30 persen arus perdagangan maritim dunia, sehingga menempatkannya sebagai salah satu koridor ekonomi paling vital di kawasan Indo-Pasifik. Meskipun memberikan kontribusi besar terhadap konektivitas dan perdagangan global, pengaturan hukum internasional tersebut juga menghadirkan tantangan keamanan yang kompleks. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah diperbolehkannya kapal selam militer asing melintas dalam kondisi menyelam (*submerged transit*) tanpa kewajiban memberikan pemberitahuan kepada otoritas Indonesia. Situasi ini berpotensi menciptakan kerentanan keamanan yang signifikan, terutama mengingat kedekatan ALKI II dengan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Dalam geopolitik dan studi pertahanan, Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dipandang sebagai *Center of Gravity* (CoG) nasional, yaitu pusat kekuatan strategis yang menjadi sumber daya, penggerak, serta penopang ketahanan negara. Gangguan terhadap elemen ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kemampuan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi nasionalnya. Kedekatan geografis IKN dengan ALKI II menjadikan dinamika keamanan di jalur tersebut memiliki relevansi langsung terhadap stabilitas pusat pemerintahan baru Indonesia. Berbagai ancaman, baik yang berasal dari aktor negara melalui aktivitas militer maupun dari aktor non-negara dalam bentuk kejahatan lintas batas, berpotensi memengaruhi keamanan dan keberlangsungan fungsi strategis IKN. Oleh karena itu, kondisi ini menuntut pengembangan strategi keamanan maritim yang komprehensif, tidak hanya berorientasi pada respons terhadap ancaman yang muncul, tetapi juga menekankan pendekatan preventif, adaptif, dan berlapis guna mengantisipasi berbagai risiko yang berkembang di lingkungan strategis sekitar IKN.

Kajian akademik yang secara khusus menelaah hubungan antara sekuritisasi ALKI II dan stabilitas Ibu Kota Nusantara (IKN) masih tergolong terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya

Konstruksi Ancaman Keamanan ALKI II terhadap Stabilitas Ibu Kota Nusantara: Analisis Kebijakan Strategis Indonesia dalam Merespons Ancaman Aktor Negara dan Non-Negara dalam Perspektif Securitization Theory
(Kamilah)

cenderung berfokus pada dimensi ekonomi maritim, pengelolaan jalur pelayaran internasional, atau isu pertahanan wilayah dalam cakupan yang lebih luas. Keterbatasan literatur tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi, terutama terkait pemahaman mengenai bagaimana dinamika keamanan di ALKI II dapat memengaruhi stabilitas dan ketahanan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis bagaimana berbagai ancaman yang muncul di ALKI II dikonstruksikan sebagai isu keamanan nasional, serta bagaimana kebijakan strategis Indonesia dirumuskan sebagai respons terhadap konstruksi ancaman tersebut. Dengan mengintegrasikan *Securitization Theory* dari *Copenhagen School* dan konsep *Sea Power* yang dikemukakan oleh Mahan, penelitian ini diarahkan untuk: (1) mengidentifikasi karakteristik dan spektrum ancaman yang berasal dari aktor negara maupun non-negara di kawasan ALKI II; (2) menganalisis proses sekuritisasi isu ALKI II dalam kerangka kebijakan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia; serta (3) mengevaluasi relevansi, efektivitas, dan kecukupan respons strategis yang telah dirancang dalam menghadapi tantangan keamanan yang berkembang di kawasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan desain studi kasus (*case study research*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi secara mendalam terhadap kompleksitas fenomena keamanan maritim yang bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi ke dalam pengukuran kuantitatif semata. Studi kasus ALKI II dipilih sebagai unit analisis karena karakteristiknya yang unik sebagai jalur laut strategis yang secara simultan memengaruhi dimensi ekonomi, militer, hukum, dan keamanan nasional Indonesia.

Penelitian ini mengintegrasikan *Securitization Theory* dari *Copenhagen School* dan konsep *Sea Power* yang dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan. *Securitization Theory* yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde digunakan untuk memahami bagaimana suatu isu dikonstruksikan menjadi ancaman keamanan melalui proses diskursif. Teori ini berargumen bahwa sebuah isu tidak secara inheren merupakan masalah keamanan, melainkan menjadi isu keamanan melalui proses *speech act*, yaitu tindakan ketika aktor tertentu menyatakan bahwa suatu objek referensi menghadapi ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan luar biasa di luar mekanisme politik normal. Keberhasilan proses sekuritisasi bergantung pada penerimaan audiens terhadap konstruksi ancaman tersebut sehingga tindakan yang diambil memperoleh legitimasi sosial dan politik.

Proses sekuritisasi ALKI II dianalisis melalui tiga komponen utama. Pertama, aktor sekuritisasi yaitu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan, Lemhannas RI, Seskoal, dan berbagai dokumen strategis pertahanan yang mengonstruksikan ALKI II sebagai isu keamanan strategis. Kedua, objek referensi yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diposisikan sebagai pusat pemerintahan, simbol identitas nasional, dan pusat gravitasi (*Center of Gravity*) negara yang harus dilindungi. Ketiga, tindakan sekuritisasi yang tercermin dalam pembangunan infrastruktur pertahanan maritim, penguatan kapasitas militer, serta berbagai kebijakan keamanan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas kawasan ALKI II. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi ancaman yang dihadapi, tetapi juga menganalisis bagaimana ancaman tersebut dikonstruksikan dan dilegitimasi dalam kebijakan pertahanan nasional.

Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep *Sea Power* Alfred Thayer Mahan untuk

Konstruksi Ancaman Keamanan ALKI II terhadap Stabilitas Ibu Kota Nusantara: Analisis Kebijakan Strategis Indonesia dalam Merespons Ancaman Aktor Negara dan Non-Negara dalam Perspektif Securitization Theory
(Kamilah)

menganalisis dimensi strategis penguasaan ruang maritim. Mahan menegaskan bahwa kekuatan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengendalikan jalur-jalur laut strategis melalui kekuatan armada, infrastruktur pangkalan, dan dukungan maritim yang memadai. Dalam kerangka ini, konsep *Sea Control* dan *Sea Denial* digunakan sebagai instrumen analitis untuk menilai kapasitas Indonesia dalam mengamankan ALKI II. *Sea Control* merujuk pada kemampuan negara untuk menggunakan dan mengendalikan ruang maritim sekaligus membatasi penggunaan ruang tersebut oleh pihak lain, sedangkan *Sea Denial* mengacu pada kemampuan untuk mencegah aktor lain memanfaatkan wilayah laut bagi kepentingannya.

Penerapan konsep tersebut menjadi relevan mengingat posisi strategis Selat Makassar sebagai bagian utama ALKI II yang memiliki kedalaman laut yang mendukung operasi kapal selam dan berada pada jalur pelayaran internasional yang sangat padat. Dalam konteks keamanan IKN, kemampuan Indonesia untuk mewujudkan *Sea Control* di kawasan ini menjadi faktor penting dalam menjaga jalur logistik, komunikasi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, kombinasi *Securitization Theory* dan *Sea Power* digunakan untuk menjelaskan hubungan antara konstruksi ancaman di ALKI II dan respons strategis Indonesia dalam mengamankan kawasan yang memiliki kedekatan geografis dengan IKN.

Data primer penelitian bersumber dari dokumen regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, dokumen kebijakan strategis pertahanan, termasuk Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN), serta berbagai laporan kajian dan simulasi yang diterbitkan oleh lembaga pertahanan nasional seperti Lemhannas RI dan Seskoal. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas keamanan maritim, studi pertahanan, hukum laut internasional, dan hubungan internasional, serta publikasi akademik yang memuat hasil simulasi operasi militer.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan. Tahap pertama adalah kondensasi data, yaitu proses seleksi, penyederhanaan, dan kategorisasi informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data melalui pengorganisasian temuan ke dalam kerangka analisis yang sistematis dan koheren. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan empiris dan kerangka analisis yang digunakan untuk menghasilkan interpretasi yang komprehensif. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen kebijakan, kajian akademik, dan data simulasi, serta triangulasi analisis melalui penggunaan *Securitization Theory* dan konsep *Sea Power* sebagai instrumen untuk memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Konstruksi Ancaman Aktor Negara (Dimensi Tradisional dan Intelijen Strategis)

Ancaman yang berasal dari aktor negara terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui koridor ALKI II dapat dikategorikan sebagai ancaman keamanan tradisional yang beroperasi melalui dua dimensi utama, yaitu proyeksi kekuatan militer dan aktivitas intelijen strategis. Ancaman ini muncul dari kombinasi antara kapabilitas militer negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Indo-Pasifik dan kerentanan yang timbul akibat rezim hukum internasional yang mengatur hak lintas alur laut kepulauan. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika lingkungan strategis regional

Konstruksi Ancaman Keamanan ALKI II terhadap Stabilitas Ibu Kota Nusantara: Analisis Kebijakan Strategis Indonesia dalam Merespons Ancaman Aktor Negara dan Non-Negara dalam Perspektif Securitization Theory
(Kamilah)

mengalami perubahan yang signifikan, terutama setelah terbentuknya pakta keamanan AUKUS serta meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Perkembangan tersebut telah mendorong peningkatan intensitas dan kompleksitas aktivitas militer asing di kawasan perairan yang terhubung dengan ALKI II, sehingga menambah tantangan keamanan bagi Indonesia, khususnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan IKN yang berada di dekat jalur maritim strategis tersebut.

A. Dinamika Geopolitik Indo-Pasifik dan Implikasinya terhadap ALKI II

Perubahan lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik setelah tahun 2020 ditandai oleh semakin intensnya persaingan antar kekuatan besar, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta terbentuknya AUKUS sebagai kemitraan pertahanan trilateral yang melibatkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Kehadiran AUKUS membawa implikasi strategis yang signifikan, khususnya melalui pengembangan armada kapal selam bertenaga nuklir Australia yang berpotensi meningkatkan aktivitas kapal selam berkapasitas besar di kawasan Indo-Pasifik, termasuk pada jalur ALKI II. Selat Makassar memiliki karakteristik geografis yang sangat mendukung operasi kapal selam modern. Kedalaman laut yang mencapai lebih dari 1.000 meter serta keberadaan lapisan termoklin yang dapat mengurangi efektivitas deteksi sonar menjadikan wilayah tersebut sebagai area yang ideal untuk manuver dan operasi bawah permukaan.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kapal selam yang beroperasi di koridor ALKI II memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai misi strategis, seperti *Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance* (ISR), pemetaan batimetri dasar laut, hingga pengumpulan informasi elektronik yang berkaitan dengan instalasi pertahanan dan infrastruktur strategis di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Aktivitas semacam ini dapat dilakukan tanpa secara langsung melanggar ketentuan hukum laut internasional yang mengatur hak lintas alur laut kepulauan. Situasi tersebut menciptakan tantangan keamanan yang kompleks bagi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kewajiban untuk menjamin akses pelayaran internasional sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Di sisi lain, negara juga dituntut untuk memastikan keamanan IKN sebagai pusat pemerintahan dan pusat gravitasi strategis nasional dari berbagai bentuk ancaman yang memanfaatkan rezim kebebasan navigasi yang diakui dalam hukum internasional.

B. Analisis Simulasi Kerentanan IKN terhadap Serangan Udara

Dimensi ancaman dari aktor negara terlihat dalam berbagai simulasi operasi militer yang memproyeksikan kerentanan IKN terhadap serangan udara. Analisis yang dilakukan oleh Kalasmoro dkk. (2023) menunjukkan bahwa lokasi IKN relatif dekat dengan sejumlah pangkalan udara di kawasan perbatasan, sehingga memungkinkan pesawat tempur modern menjangkaukannya dalam waktu yang sangat singkat. Dengan asumsi kecepatan pesawat tempur generasi keempat sekitar 950 km/jam hingga pesawat supersonik yang mampu mencapai 2.500 km/jam, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai IKN diperkirakan hanya berkisar antara 15 hingga 48 menit, bergantung pada titik keberangkatan dan karakteristik platform yang digunakan. Dari wilayah sekitar Sipadan yang berjarak kurang lebih 602 km, waktu tempuh diperkirakan berada pada rentang 15–38 menit. Sementara itu, dari Pangkalan RMAF Labuan yang berjarak sekitar 712 km diperlukan waktu 17–45 menit, dan dari RMAF Kuching yang berjarak sekitar 759 km dibutuhkan sekitar 18–48 menit untuk menjangkau kawasan IKN.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jendela waktu respons yang sangat terbatas dalam menghadapi potensi ancaman udara terhadap IKN. Seluruh estimasi waktu kedatangan ancaman berada di bawah satu jam, sehingga menyisakan ruang yang sempit bagi proses deteksi, identifikasi, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan intersepsi. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi efektivitas sistem pertahanan udara nasional, mengingat pengoperasian sistem pertahanan berlapis memerlukan waktu untuk mengaktifkan radar, mengoordinasikan pusat komando, dan mengerahkan aset pencegat secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan udara terhadap IKN tidak dapat bergantung sepenuhnya pada dukungan pangkalan militer yang berlokasi jauh dari kawasan ibu kota baru. Sebaliknya, diperlukan penempatan aset pertahanan udara yang lebih dekat dan terintegrasi dengan sistem peringatan dini agar kemampuan respons terhadap berbagai skenario ancaman dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

C. Ancaman Bawah Permukaan (*Security as Silence*)

Salah satu bentuk ancaman dari aktor negara yang paling sulit diidentifikasi namun memiliki potensi dampak yang sangat besar adalah operasi intelijen bawah permukaan yang berlangsung secara tersembunyi di wilayah maritim strategis. Ancaman ini sering kali tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan konvensional karena berlangsung di bawah permukaan laut dan memanfaatkan keterbatasan kemampuan pemantauan negara pantai. Dalam konteks ALKI II, ketentuan mengenai hak lintas alur laut kepulauan yang diatur dalam UNCLOS 1982 memungkinkan kapal selam asing melintas tanpa harus muncul ke permukaan atau memberikan pemberitahuan kepada otoritas Indonesia. Situasi tersebut menciptakan ruang bagi berbagai aktivitas intelijen yang sulit diawasi secara langsung, mulai dari pengumpulan informasi elektronik, pemetaan karakteristik dasar laut, hingga pemasangan perangkat pemantauan bawah air yang dapat digunakan untuk kepentingan strategis tertentu.

Kerentanan ini semakin meningkat karena kemampuan pengawasan bawah laut Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi teknologi maupun cakupan operasional. Luasnya wilayah ALKI II dan kompleksitas kondisi hidrografis Selat Makassar menjadikan pengawasan menyeluruh terhadap aktivitas bawah permukaan sebagai tantangan yang besar. Hingga saat ini, kapasitas pemantauan bawah laut belum sepenuhnya didukung oleh jaringan sensor hidroakustik permanen yang mampu mendeteksi aktivitas kapal selam secara berkelanjutan di titik-titik strategis. Akibatnya, Indonesia berada dalam posisi yang kompleks yaitu di satu sisi memiliki kewajiban untuk menjamin kelancaran akses pelayaran internasional sesuai hukum laut internasional, namun di sisi lain harus menghadapi risiko bahwa akses tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan intelijen yang berpotensi mengganggu keamanan nasional dan mengancam kepentingan strategis negara, termasuk keamanan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru.

Konstruksi Ancaman Aktor Non-Negara: Anatomi Kejahatan Transnasional 2019–2024

Selain menghadapi ancaman yang berasal dari aktor negara, ALKI II juga menjadi ruang operasional bagi berbagai bentuk ancaman non-tradisional yang dilakukan oleh aktor non-negara melalui jaringan kejahatan transnasional. Posisi ALKI II sebagai jalur pelayaran internasional yang ramai dan

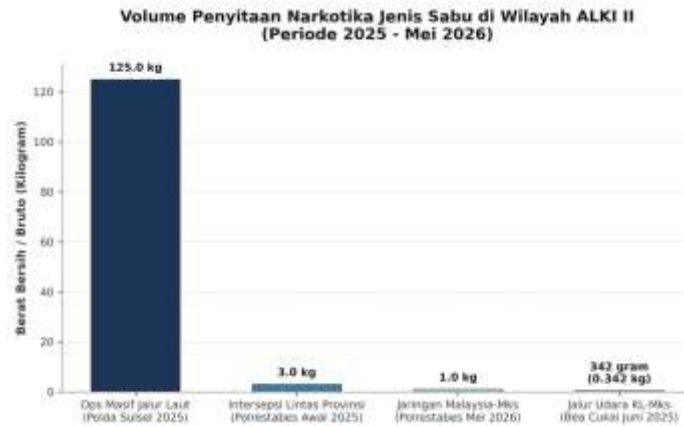
memiliki konektivitas tinggi menjadikannya rentan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kriminal lintas negara untuk menjalankan berbagai aktivitas ilegal. Dalam sejumlah kajian mengenai dinamika keamanan maritim di kawasan ini, ancaman non-tradisional yang paling menonjol meliputi penyelundupan narkoba, terorisme maritim, serta praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Ketiga bentuk ancaman tersebut memiliki implikasi yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan nasional, termasuk keamanan Ibu Kota Nusantara yang berada dalam kedekatan geografis dengan koridor ALKI II.

Karakteristik utama ancaman non-tradisional di kawasan ini terletak pada sifatnya yang terorganisasi, lintas batas, dan saling terhubung satu sama lain. Jaringan penyelundupan narkoba, kelompok kriminal maritim, hingga pelaku penangkapan ikan ilegal sering kali memanfaatkan jalur, infrastruktur dan pola operasi yang serupa untuk menghindari pengawasan aparat. Hubungan antarkelompok tersebut membentuk ekosistem kejahatan yang kompleks dan adaptif sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral yang terpisah. Oleh karena itu, keberadaan berbagai ancaman non-tradisional di ALKI II perlu dipahami sebagai bagian dari tantangan keamanan maritim yang terintegrasi dan berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan sekaligus mengganggu upaya Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketahanan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru.

A. Penyelundupan Narkoba dan Jaringan Kartel Maritim

Salah satu ancaman non-tradisional yang paling menonjol di ALKI II adalah penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Berbagai kajian menunjukkan bahwa mayoritas peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia memanfaatkan rute maritim, dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi menjadi bagian dari koridor yang sering digunakan dalam jaringan distribusi internasional. Karakteristik ALKI II sebagai jalur pelayaran yang padat memberikan keuntungan bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan aktivitas mereka di tengah tingginya arus kapal komersial yang melintas setiap hari. Kapal-kapal berukuran kecil yang membawa muatan ilegal dapat beroperasi di antara lalu lintas pelayaran yang sangat ramai, sehingga menyulitkan aparat keamanan maritim untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh kapal yang melintas.

Indikasi penggunaan ALKI II sebagai jalur logistik narkoba juga tercermin dari sejumlah kasus penegakan hukum yang berhasil diungkap oleh aparat keamanan di wilayah Kalimantan Timur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kawasan yang terhubung dengan ALKI II masih menjadi salah satu titik masuk penting bagi peredaran narkoba lintas negara. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ancaman penyelundupan narkoba tidak hanya berkaitan dengan aspek kriminalitas, tetapi juga memiliki dimensi keamanan yang lebih luas karena dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ketahanan masyarakat.



Gambar 1.: Grafik Komparatif Volume Sitaan Sabu Berdasarkan Klaster Operasi di ALKI II

Tabel 1 Rincian Data dan Modus Operandi Kasus

Aparat Penegak Hukum	Waktu Operasi	Jumlah Barang Bukti	Modus Operandi Utama
Polda Sulsel & BNNP Sulsel	Sepanjang 2025	125 Kilogram Sabu (dan 8,741 Ton Ganja)	Operasi gabungan skala masif menysasar jalur laut Selat Makassar komoditas logistik.
Timsus Satresnarkoba Polrestabes	Awal 2025	3 Kilogram Lebih Sabu	Memanfaatkan jaringan kapal logistik komersial lintas provinsi untuk suplai antar pulau.
Satresnarkoba Polrestabes Makassar	Mei 2026	1 Kilogram Lebih Sabu	Rute transit Malaysia - Tanjung Pinang - Makassar. Menggunakan teknik <i>false concealment</i> .
Kanwil DJBC Sulbagsel & KPPBC	Juni 2025	342 Gram Bruto Sabu	Jalur udara langsung Kuala Lumpur - Makassar. Menggunakan metode ekstrem <i>body strapping</i> .

Gambar 1.0 menunjukkan ketimpangan volume yang signifikan antara jalur penyelundupan maritim dan udara di wilayah ALKI II. Sektor laut memegang porsi terbesar dalam angka penyitaan, didominasi oleh operasi masif Polda Sulsel dan BNNP Sulsel sepanjang tahun 2025 yang berhasil mengamankan 125 kilogram sabu dan 8,741 ton ganja. Skala makro ini menegaskan bahwa perairan terbuka Selat Makassar merupakan rute logistik utama yang dieksploitasi sindikat untuk mendistribusikan narkotika dalam jumlah besar menuju wilayah Indonesia Timur. Di sisi lain, intervensi taktis pada jalur udara dan ekspedisi lintas provinsi menghasilkan volume sitaan yang lebih kecil namun memiliki kompleksitas modus operandi yang tinggi. Hal ini terlihat dari pembongkaran jaringan ekspedisi oleh Polrestabes Makassar seberat 3 kilogram lebih sabu di awal 2025, kasus falsifikasi sabuk (*false concealment*) jaringan Malaysia-Makassar sebesar 1 kilogram lebih sabu pada Mei 2026, serta penindakan metode penempelan tubuh (*body strapping*) seberat 342 gram bruto sabu oleh Bea Cukai pada Juni 2025. Meskipun volume penyitaan di titik transit

udara dan logistik lokal ini jauh lebih kecil dibandingkan jalur laut bebas, pengetatan pengawasan di area ini berhasil memaksa sindikat memperkecil unit selundupan mereka guna mereduksi risiko intersep. Secara kumulatif, sinergi penegakan hukum lintas instansi di sepanjang koridor strategis ALKI II ini terbukti memberikan dampak krusial dengan menyelamatkan lebih dari 177.000 jiwa penduduk dari ancaman narkoba.

Ancaman pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ini menjadi semakin relevan. Perkembangan kawasan Balikpapan dan Penajam Paser Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman baru diperkirakan akan meningkatkan mobilitas penduduk serta aktivitas ekonomi secara signifikan. Pertumbuhan tersebut berpotensi menciptakan pasar baru yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan narkoba internasional apabila tidak diantisipasi melalui penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum maritim. Oleh karena itu, upaya pengamanan ALKI II tidak hanya penting dalam perspektif pertahanan negara, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan sosial masyarakat dan stabilitas lingkungan strategis di sekitar IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

B. Terorisme Maritim: Ancaman dari Koridor Sulu-Sulawesi

Ancaman terorisme maritim juga menjadi salah satu tantangan keamanan yang perlu diperhatikan. Kawasan yang membentang dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan, Sabah di Malaysia Timur, hingga Laut Sulawesi dan perairan Kalimantan Timur telah lama dikenal sebagai wilayah yang rentan terhadap aktivitas kelompok bersenjata non-negara. Sejumlah kelompok ekstremis di kawasan tersebut memanfaatkan karakteristik geografis perairan yang luas, banyaknya pulau kecil serta keterbatasan pengawasan lintas batas untuk mendukung mobilitas dan aktivitas operasional mereka. Meskipun berbagai operasi keamanan yang dilakukan negara-negara kawasan telah berhasil melemahkan sejumlah organisasi teroris, jaringan yang tersisa menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi melalui pola operasi yang lebih tersebar, fleksibel, dan berbasis maritim.

Secara geografis, keterhubungan antara Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan ALKI II menciptakan koridor maritim yang memungkinkan pergerakan manusia, logistik, maupun sumber daya lainnya melintasi batas negara dengan relatif cepat. Jalur laut ini berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan mobilisasi personel atau distribusi perlengkapan tanpa harus melewati mekanisme pengawasan perbatasan darat yang umumnya lebih ketat. Kondisi tersebut menjadikan kawasan perairan di sekitar ALKI II sebagai ruang yang memiliki nilai strategis sekaligus kerentanan keamanan yang perlu diantisipasi secara serius.

Berhubungan dengan pembangunan IKN, keberadaan koridor maritim tersebut memiliki implikasi langsung terhadap keamanan kawasan penyangga ibu kota baru. Kedekatan geografis antara wilayah pesisir Kalimantan Timur dan jalur-jalur pelayaran yang terhubung dengan kawasan rawan aktivitas kelompok ekstremis meningkatkan urgensi penguatan pengawasan maritim, kerja sama keamanan regional, serta sistem deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman non-tradisional. Oleh karena itu, pengamanan ALKI II tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap jalur perdagangan dan pelayaran internasional, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas keamanan lingkungan strategis yang menopang keberlangsungan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia.

C. IUU Fishing: Ancaman Kedaulatan Bermodus Nelayan

Konstruksi Ancaman Keamanan ALKI II terhadap Stabilitas Ibu Kota Nusantara: Analisis Kebijakan Strategis Indonesia dalam Merespons Ancaman Aktor Negara dan Non-Negara dalam Perspektif Securitization Theory (Kamilah)

Praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Sulawesi dan wilayah perairan yang terhubung dengan ALKI II umumnya dipandang sebagai persoalan ekonomi karena menyebabkan kerugian besar terhadap sektor perikanan nasional. Namun, di balik dampak ekonominya, aktivitas tersebut juga memiliki implikasi keamanan yang semakin mendapat perhatian dalam kajian keamanan maritim. Kehadiran kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya laut Indonesia tetapi juga dapat menjadi indikator meningkatnya aktivitas aktor asing di kawasan strategis yang memiliki kedekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa aktivitas penangkapan ikan ilegal dalam skala besar dapat berfungsi sebagai bagian dari strategi *grey zone*, yaitu tindakan yang berada di antara kondisi damai dan konflik terbuka. Melalui kehadiran yang terus-menerus di wilayah perairan tertentu, kapal-kapal asing dapat menguji respons aparat keamanan, mengamati pola patroli, serta mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan maritim yang dimiliki suatu negara. Dengan demikian, praktik *IUU Fishing* tidak selalu semata-mata berorientasi pada eksploitasi sumber daya perikanan, tetapi juga berpotensi memiliki nilai strategis yang lebih luas.

Selain itu, kapal-kapal yang beroperasi secara ilegal di wilayah maritim strategis dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang bernilai intelijen. Data mengenai kondisi hidrografis, pola pergerakan kapal patroli, tingkat pengawasan di wilayah tertentu, hingga perkembangan infrastruktur di kawasan pesisir dapat diperoleh melalui observasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan IKN yang masih berlangsung, informasi mengenai aktivitas logistik, pembangunan infrastruktur strategis, maupun pengembangan fasilitas pertahanan di Kalimantan Timur memiliki nilai yang signifikan bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap dinamika keamanan Indonesia. Oleh karena itu, praktik *IUU Fishing* perlu dipahami tidak hanya sebagai ancaman terhadap ekonomi kelautan, tetapi juga sebagai tantangan keamanan maritim yang berpotensi memengaruhi perlindungan kawasan strategis nasional, termasuk lingkungan penyangga IKN.

Evaluasi Kebijakan Strategis Indonesia: Antara Ambisi dan Realitas Kapasitas

Merespons konstruksi ancaman yang kompleks tersebut, pemerintah Indonesia telah merumuskan serangkaian kebijakan strategis yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang multidimensionalitas ancaman di ALKI II. Namun, evaluasi kritis terhadap kebijakan-kebijakan ini mengungkapkan kesenjangan yang signifikan antara ambisi strategis dalam dokumen perencanaan dengan kapasitas implementasi aktual di lapangan.

A. Strategi Pertahanan Berlapis (*Defence in Depth*)

Sebagai respons terhadap berbagai ancaman yang berkembang di ALKI II, pemerintah Indonesia melalui Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) merancang sistem pengamanan yang berbasis pada konsep *Defence in Depth* atau pertahanan berlapis. Konsep ini diwujudkan melalui pembentukan tiga zona pertahanan konsentris yang saling terhubung dan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bertingkat terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN). Zona pertama adalah *Surveillance Area* dengan cakupan hingga 1.000 mil laut yang berfungsi sebagai lapisan deteksi dini untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengklasifikasikan berbagai potensi ancaman sejak berada pada jarak yang relatif jauh dari wilayah strategis nasional. Zona kedua

adalah *Destruction Area* dengan radius sekitar 500 mil laut yang dirancang sebagai ruang operasional untuk melakukan tindakan penangkalan dan penindakan terhadap ancaman yang telah teridentifikasi. Sementara itu, zona ketiga adalah *Vital Area* dengan radius sekitar 200 mil laut yang berperan sebagai lapisan perlindungan terakhir bagi kawasan IKN dan objek-objek vital strategis di sekitarnya.

Secara konseptual, desain pertahanan tersebut menunjukkan adanya pemahaman yang cukup komprehensif terhadap prinsip-prinsip pertahanan modern yang menekankan pentingnya deteksi dini, kemampuan respons bertahap, serta perlindungan berlapis terhadap pusat gravitasi nasional. Melalui pendekatan ini, ancaman diharapkan dapat dideteksi dan dihadapi jauh sebelum mencapai kawasan inti yang harus dilindungi. Dengan demikian, setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menciptakan sistem pertahanan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi konsep tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Keterbatasan cakupan sistem pengawasan maritim, khususnya radar dan sarana pemantauan lainnya masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan fungsi deteksi dini secara optimal. Selain itu, sebagian besar alat utama sistem persenjataan (*alutsista*) yang menjadi tulang punggung pengamanan maritim menghadapi persoalan usia operasional yang semakin menua, sehingga dapat memengaruhi efektivitas dan kesiapan operasionalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka strategis pertahanan telah dirancang secara sistematis, masih terdapat kesenjangan antara konsep yang dirumuskan dalam dokumen kebijakan dan kapasitas aktual yang tersedia di lapangan. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur pengawasan, modernisasi *alutsista*, dan peningkatan kesiapan operasional menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa sistem pertahanan berlapis yang direncanakan dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung keamanan ALKI II dan IKN.

B. *Virtual Maritime Gate: Lompatan Teknologi yang Terancam Terlambat*

Sebagai bagian dari strategi pengamanan ALKI II dan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan *Virtual Maritime Gate* (VMG), yaitu sebuah sistem pengawasan maritim terintegrasi yang menggabungkan berbagai teknologi pemantauan modern dalam satu arsitektur operasional. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan sensor hidroakustik bawah laut, radar pesisir, satelit penginderaan dan pengintaian, serta armada *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) yang didukung oleh teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) untuk meningkatkan kemampuan deteksi, identifikasi, dan analisis ancaman secara *real-time*. Dalam perencanaan yang telah disusun, VMG diproyeksikan menjadi salah satu komponen utama dalam sistem pertahanan maritim Indonesia dan dijadwalkan selesai pada Tahap IV pembangunan IKN, yaitu sekitar tahun 2035 hingga 2039.

Meskipun secara konseptual VMG menawarkan solusi yang komprehensif terhadap berbagai tantangan keamanan maritim, evaluasi terhadap jadwal implementasinya menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat ancaman yang dihadapi dan kesiapan kapasitas respons yang direncanakan. Berbagai dokumen strategis dan kajian keamanan menunjukkan bahwa ancaman seperti aktivitas intelijen bawah laut, pengumpulan data strategis oleh kapal asing, serta peningkatan kehadiran kekuatan militer di kawasan Indo-Pasifik bukanlah potensi ancaman jangka panjang semata, melainkan fenomena yang telah berlangsung dan berkembang pada masa

sekarang. Namun demikian, sistem teknologi yang diproyeksikan menjadi tulang punggung pengawasan maritim nasional baru akan beroperasi secara penuh dalam rentang waktu satu dekade atau lebih ke depan.

Kondisi tersebut menciptakan tantangan strategis yang signifikan karena periode sebelum VMG beroperasi penuh berpotensi menjadi fase paling rentan bagi keamanan ALKI II dan kawasan sekitar IKN. Dinamika keamanan regional yang ditandai oleh modernisasi kekuatan maritim dan peningkatan kemampuan kapal selam negara-negara di kawasan menunjukkan bahwa ancaman terhadap ruang maritim Indonesia dapat berkembang lebih cepat dibandingkan pembangunan infrastruktur pengawasannya. Oleh karena itu, berbagai kajian mendorong perlunya percepatan pembangunan komponen-komponen krusial VMG, terutama yang berkaitan dengan kemampuan deteksi dini seperti sensor bawah laut, radar pesisir, dan sistem pemantauan maritim terpadu. Langkah tersebut dipandang penting untuk memperkuat kapasitas pengawasan sejak tahap awal pembangunan IKN, sehingga dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*early deterrence*) yang efektif dalam menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di kawasan ALKI II.

C. Transformasi Lanal Balikpapan dan Konsep Pangkalan 5R

Selain pembangunan sistem pengawasan maritim terpadu, penguatan infrastruktur pangkalan militer di kawasan yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan elemen penting dalam strategi pertahanan Indonesia. Sejumlah kajian menempatkan Lanal Balikpapan sebagai salah satu aset strategis yang memiliki posisi krusial dalam mendukung pengamanan ALKI II dan kawasan sekitar IKN. Oleh karena itu, peningkatan status dan kapasitas pangkalan tersebut dipandang penting untuk memastikan kehadiran kekuatan laut yang lebih permanen, responsif, dan berkelanjutan di wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi bagi keamanan nasional.

Pengembangan pangkalan militer tersebut tidak hanya berkaitan dengan penambahan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut kemampuan operasional yang komprehensif. Dalam konteks ini, konsep 5R menjadi acuan penting dalam membangun pangkalan yang mampu mendukung operasi maritim secara efektif. Konsep tersebut mencakup kemampuan *Rebase* melalui penyediaan fasilitas sandar bagi kapal-kapal berukuran besar, *Replenishment* berupa dukungan logistik dan bahan bakar yang memadai, *Repair* melalui fasilitas pemeliharaan dan perbaikan alutsista, *Rest* untuk mendukung pemulihan personel, serta *Recreation* yang berfungsi menjaga kesejahteraan dan moral prajurit. Integrasi kelima fungsi tersebut akan memungkinkan pangkalan beroperasi sebagai pusat dukungan militer yang mandiri dan mampu menopang operasi dalam jangka waktu yang panjang.

Urgensi peningkatan kapasitas pangkalan di sekitar IKN semakin terlihat ketika dikaitkan dengan kebutuhan respons cepat terhadap berbagai ancaman keamanan. Jarak yang relatif jauh antara sebagian aset utama TNI AL dengan kawasan IKN dapat memengaruhi kecepatan pengerahan kekuatan ketika terjadi situasi darurat. Sementara itu, karakter ancaman kontemporer menunjukkan kecenderungan bergerak dengan tempo yang semakin cepat, baik dalam bentuk ancaman udara, aktivitas intelijen maritim, maupun ancaman non-tradisional yang memanfaatkan jalur laut. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk menghadirkan kekuatan militer secara cepat di wilayah strategis menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas pertahanan. Oleh

karena itu, penguatan pangkalan militer di kawasan Balikpapan dan sekitarnya tidak hanya berfungsi sebagai peningkatan kapasitas operasional, tetapi juga sebagai upaya mengurangi kesenjangan respons dan memperkuat postur pertahanan Indonesia dalam melindungi ALKI II serta IKN sebagai pusat pemerintahan baru.

Dimensi Asimetris: Kedaulatan Ekonomi dan Ketahanan Ekologis

Selain ancaman militer dan kejahatan transnasional, keamanan ALKI II dan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga dipengaruhi oleh berbagai tantangan asimetris yang bersifat sosial, ekonomi, dan ekologis. Ancaman jenis ini sering kali tidak muncul dalam bentuk konfrontasi langsung tetapi dapat memengaruhi stabilitas nasional secara perlahan melalui melemahnya ketahanan masyarakat di kawasan strategis. Sebagai wilayah perbatasan, sejumlah studi menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap negara tetangga masih menjadi fenomena yang nyata. Ketika aktivitas perdagangan, akses barang kebutuhan pokok, maupun transaksi ekonomi sehari-hari lebih terhubung dengan pusat-pusat ekonomi di luar Indonesia, maka ikatan ekonomi masyarakat dengan negara dapat menjadi kurang kuat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi rasa keterikatan sosial dan persepsi masyarakat terhadap proyek strategis nasional, termasuk IKN sebagai simbol baru pusat pemerintahan Indonesia.

Di sisi lain, pembangunan IKN yang berlangsung secara intensif juga menghadirkan tantangan ekologis yang memiliki implikasi keamanan jangka panjang. Aktivitas pembangunan berskala besar di wilayah pesisir dan laut berpotensi memengaruhi kondisi ekosistem maritim, termasuk terumbu karang, kualitas perairan, dan sumber daya perikanan yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat pesisir. Apabila degradasi lingkungan terus berlanjut, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek ekonomi lokal, tetapi juga pada kapasitas pengawasan maritim berbasis masyarakat. Selama ini, komunitas nelayan memiliki peran penting sebagai sumber informasi awal mengenai aktivitas mencurigakan di wilayah perairan karena intensitas interaksi mereka dengan ruang laut jauh lebih tinggi dibandingkan aparat yang jumlahnya terbatas. Menurunnya aktivitas perikanan akibat kerusakan ekosistem dapat mengurangi efektivitas jaringan pengawasan informal tersebut.

Oleh karena itu, pendekatan keamanan maritim yang berkelanjutan perlu mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan ke dalam strategi pengamanan ALKI II. Salah satu pendekatan yang banyak direkomendasikan adalah *Community-Based Maritime Security*, yaitu model keamanan yang melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan sebagai mitra strategis negara dalam mendukung pengawasan wilayah laut. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga bagian dari sistem deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang muncul di kawasan maritim. Integrasi antara teknologi pengawasan modern, seperti sistem pemantauan maritim terpadu, dengan partisipasi aktif komunitas lokal diyakini mampu menciptakan sistem keamanan yang lebih adaptif, resilien, dan efisien.

Dalam konteks pembangunan IKN, strategi keamanan juga perlu dihubungkan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Program pengelolaan wilayah pesisir, konservasi ekosistem laut, serta penerapan konsep pembangunan yang ramah lingkungan harus diposisikan sebagai bagian dari agenda keamanan nasional. Dengan demikian, pembangunan fisik IKN tidak hanya menghasilkan pusat pemerintahan yang modern, tetapi juga mampu meminimalkan munculnya kerentanan sosial dan ekologis yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan ALKI II dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keamanan ALKI II memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang stabilitas dan kedaulatan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kedekatan geografis antara IKN dan ALKI II menjadikan dinamika keamanan di jalur tersebut memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan fungsi pemerintahan, pertahanan, dan keamanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman yang berkembang di ALKI II bersifat multidimensional, mencakup ancaman dari aktor negara berupa aktivitas intelijen bawah laut dan proyeksi kekuatan militer, serta ancaman dari aktor non-negara seperti penyelundupan narkoba, terorisme maritim, dan praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Melalui proses sekuritisasi yang tercermin dalam berbagai dokumen strategis pertahanan nasional, isu keamanan ALKI II telah dikonstruksikan sebagai ancaman terhadap objek referensi berupa IKN dan kedaulatan negara, sehingga mendorong legitimasi bagi penguatan kebijakan pertahanan maritim Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa *Securitization Theory* mampu menjelaskan bagaimana ancaman di ALKI II dikonstruksikan dan diterjemahkan ke dalam respons kebijakan keamanan nasional.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara komitmen kebijakan dan kapasitas pertahanan yang tersedia. Keterbatasan cakupan sistem pengawasan maritim, kondisi sebagian alutsista yang telah melampaui usia operasional efektif, belum optimalnya infrastruktur pangkalan militer di kawasan IKN, serta masih panjangnya tahapan implementasi sistem *Virtual Maritime Gate (VMG)* menunjukkan bahwa kemampuan aktual Indonesia dalam mengamankan ALKI II belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Kesenjangan tersebut berpotensi menciptakan kerentanan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai aktor untuk mengganggu stabilitas kawasan dan keamanan IKN.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, percepatan pembangunan komponen utama *Virtual Maritime Gate*, khususnya sensor hidroakustik bawah laut dan radar pesisir, guna memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap ancaman maritim dan aktivitas intelijen bawah permukaan. Kedua, peningkatan kapasitas pangkalan militer di kawasan sekitar IKN, terutama melalui penguatan fungsi operasional dan logistik yang mampu mendukung kehadiran kekuatan laut secara berkelanjutan. Ketiga, pembangunan sistem *Maritime Domain Awareness* yang terintegrasi melalui sinergi antara TNI AL, Bakamla, Polri Airud, pemerintah daerah, dan komunitas pesisir sebagai bagian dari pendekatan keamanan maritim yang lebih komprehensif dan adaptif.

Pada akhirnya, Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis, legitimasi hukum internasional sebagai negara kepulauan, serta kapasitas diplomatik yang memadai untuk mewujudkan pengelolaan dan pengamanan ALKI II secara efektif. Tantangan utama yang dihadapi bukan terletak pada ketersediaan konsep maupun kerangka kebijakan, melainkan pada kemampuan untuk mentransformasikan berbagai perencanaan strategis tersebut menjadi kapasitas operasional yang nyata. Oleh karena itu, konsistensi kebijakan, percepatan pembangunan infrastruktur pertahanan, serta penguatan koordinasi antarlembaga menjadi faktor kunci dalam memastikan ALKI II mampu berfungsi sebagai ruang maritim yang aman sekaligus menjadi lapisan pertahanan strategis bagi Ibu Kota Nusantara di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiantoro, C. N. (2024). Strategi penguatan pengamanan ALKI II yang terintegrasi guna menjaga stabilitas IKN. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 12(2), 45–67.
- Bakhri, S., Susmoro, H., & Rudiawan, B. (2023). *Defense strategy for inland waters of the Indonesian Archipelago Sea Channel II to deter non-military threats in the new national capital. International Journal of Peer Reviewed Scholarly and Traditional Studies (IJPSAT)*, 37(1), 1–25. ijpsat.org
- Buzan, B., Waeber, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- CNBC Indonesia. (2025, 21 Juni). *Bea cukai gagalkan penyelundupan narkoba disembunyikan di pembalut*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250621190829-4-642807/beat-cukai-gagalkan-penyelundupan-narkoba-disembunyikan-di-pembalut>
- Farhan, M. (2025). *Implementasi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) dalam pengaturan lalu lintas kapal asing di wilayah perairan Indonesia. UNES Law Review*, 7(3), 2634–2643. doi.org
- Harris, A., Sudiarmo, A., & Sutanto, R. (2022). Strategi pertahanan laut dalam rangka ancaman keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 325–331. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3745>
- Hasan, S., & Haeran. (2023). Strategi perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ditinjau dari perspektif pertahanan maritim. *Sosio Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 8(1), 55–74. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SD/article/view/8697>
- Hestutomo, H. R. K., & Febiana, R. (2024). Implementasi kebijakan sekuritisasi maritim Presiden Jokowi dalam menghadapi aktivitas ilegal di perairan Indonesia. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 16(1), 33–52. upnyk.ac.id
- Himawan, Y. (2024). Analisis pengamanan ALKI II dari ancaman bawah air dalam mendukung pertahanan Ibu Kota Nusantara (Naskah Karya Tulis Ilmiah). *Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal)*. https://smartcampus-seskoal.id/elibrary/index.php?p=show_detail&id=33454
- Iswardhana, M. R., Wirawan, A., & Sulisty, B. (2017). Kedaulatan Rupiah di perbatasan untuk mewujudkan keamanan ekonomi Indonesia. *Prosiding Seminar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) 2017*, 210–228.
- Iswardhana, M. R., Wirawan, A., & Sulisty, B. (2017). Kedaulatan Rupiah di perbatasan untuk mewujudkan keamanan ekonomi Indonesia. *Prosiding Seminar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) 2017*, 210–228.
- Lubis, R. R. (2018). *Securitization of maritime security issues in supporting Indonesia's defense diplomacy. Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(1), 23–40. idu.ac.id
- Mahan, A. T. (1890). *The influence of sea power upon history*, 1660–1783. Little, Brown and Company.
- Oktaferliandi, M. F., & Daniah, R. (2024). Ancaman kejahatan transnasional ALKI II terhadap keamanan IKN 2019–2024. *Regionalism Global Journal: Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1), 90–99. unmul.ac.id

- Putra, H. (2024). Peran TNI Angkatan Laut dalam perkuatan ketahanan maritim Indonesia: Pengamanan IKN dari ancaman di ALKI II. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5), 88–105. dinastirev.org
- Santosa, B., Winarna, A., & Nugroho, D. B. (2024). Implementasi sistem deteksi maritim terintegrasi guna meningkatkan kemampuan pengendalian laut di ALKI III dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(11), 12594–12601. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i11.6260>
- Subagio, B. P. (2025). Analisis ancaman berdasarkan perkembangan lingkungan strategis ALKI II dengan pendekatan NKKK, DIME-FIL, AHP dan SWOT. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(5), 1173–1182. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i5.830>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. bpk.go.id
- United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea. United Nations Treaty Series, 1833, 3–397. un.org
- Wicaksono, J. (2023). IKN Nusantara, *centre of gravity* baru dan upaya perkuatan keamanan bagian pembangunan pertahanan matra laut. *Jurnal Maritim Indonesia*, 11(3), 290–303. <https://maritimejournal.id/index.php/jmi/article/view/32>